

DPRD Jateng Konsultasi ke BPK

● Tindak Lanjut LHP

SEMARANG - Selasa (14/7), DPRD Jateng akan melakukan konsultasi ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jateng. Konsultasi terkait laporan hasil pemeriksaan LHP BPK atas APBD Jateng 2014.

"Konsultasi juga termasuk permintaan Dewan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, kemarin.

Menurut Rukma, banyak hal yang akan didiskusikan dengan BPK. Sebab, berdasarkan hasil rapat kerja DPRD dengan BPK di ruang Badan Anggaran (Banggar) beberapa waktu lalu, masih banyak item yang belum diperiksa BPK. Diperkirakan item-item yang tidak diperiksa memang sengaja tidak disajikan oleh eksekutif kepada BPK.

Antara lain kegiatan mendahului anggaran di Dinas Bina Marga, Dinas Ciptakaru, dan Dinas PSDA, senilai Rp 172 miliar.

"Padahal saat itu tidak ada bencana sama sekali. Itu salah satu yang akan kami diskusikan," tutur politikus PDIP itu.

Sampai kemarin DPRD belum menyampaikan surat resmi permintaan audit lebih lanjut kepada BPK. Sebab, Dewan akan berkonsultasi lebih dulu.

"Sebetulnya konsultasi sudah dijadwalkan sejak pekan lalu, tapi Kepala BPK Jateng Hery Subowo baru bisa Selasa (14/7)," imbuhnya.

Rekomendasi

Menurut rencana, konsultasi akan diikuti semua unsur pimpinan DPRD. Diharapkan semua akan mendengar langsung penjelasan BPK.

"Jika terjadi pelanggaran, yang akan memberikan rekomendasi adalah BPK, bukan DPRD. DPRD tidak memiliki target apa-apa," tandasnya.

Dia menambahkan, jika sampai ditemukan terjadi pelanggaran, aparat penegak hukum pasti akan menangani dan menindaklanjuti. Sebab, mereka juga memperoleh LHP BPK atas APBD Jateng 2014.

Seperti diketahui, Pemprov Jateng memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan atas laporan keuangan APBD Jateng 2014. BPK juga menjelaskan temuan lainnya yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara selain tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Ada 33 temuan dan 108 rekomendasi yang diberikan BPK dengan kerugian negara Rp 2,8 miliar lebih. Beberapa temuan kesalahan yang disampaikan BPK antara lain pemberian tunjangan kesehatan tenaga harian lepas dan pemberian tali asih pensiunan.

Ditemukan pula penggunaan dana mendahului anggaran Rp 172 miliar bukan untuk kegiatan penanganan bencana alam, melainkan untuk pembangunan infrastruktur rutin. (J8,H81-59)